

Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya

Poor Peasant Condition and Its Prevention Effort

Warto

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran Yogyakarta Telp. (0274) 377265. Email: wartos63@yahoo.com.

Diterima 23 April 2014, Direvisi 22 Oktober 2014, Disetujui 5 Januari 2015.

Abstract

This research is done to reveal economic, social, and cultural of poor peasant community, also to reveal the causal factors of poverty in Bantul Regency rural area and its strategy to prevent. The research takes place in Dlingo and Pajangan district that based on the consideration the area inhabited by poor peasants. Data are gathered through guided interview, observation, documentary analyses, and analyzed through qualitative-descriptive technique. The result shows that the poverty is not just because of economic aspect, but cultural and social aspect of local community. The prevention effort needs strategy, some of those are coordinated program implementation from its competent parties, not just a responsible of local government, but needs commitment of corporation, non-government organization committed to poverty, and the community.

Keywords: *Poverty Prevention; Poor Commuinty; Rural Area*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap kondisi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat tani. Di samping itu, juga mengungkap faktor penyebab kemiskinan di perdesaan dan strategi upaya penanggulangannya. Penelitian dilakukan di perdesaan Kabupaten Bantul dengan fokus daerah penelitian di Kecamatan Dlingo dan Pajangan, atas dasar pertimbangan masyarakat setempat sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berpanduan, observasi, dan telaah dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemiskinan petani/buruh tani tidak hanya menyangkut keadaan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Upaya penanggulangan kemiskinan petani perdesaan diperlukan suatu strategi, di antaranya adanya keterpaduan pelaksanaan program dari sejumlah pihak berkompeten, serta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu keterlibatan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli kemiskinan, dan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Kemiskinan; Petani; Penanggulangan Kemiskinan; Perdesaan*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian relatif luas yang tersebar di 67.439 desa. Dengan demikian, sebagian besar penduduk masih bertempat tinggal di kawasan perdesaan yang matapencahariannya bergantung pada sumberdaya lahan pertanian dengan pekerjaan pokok sebagai petani. Petani adalah penduduk yang memiliki lahan pertanian dan memperoleh penghasilan (nafkah) dari bekerja mengolah lahan milik sendiri. Buruh tani adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai lahan pertanian (sawah atau ladang), dan men-

cari penghasilan (nafkah) dengan bekerja pada usaha tani milik orang lain. Sebagai negara yang mempunyai wilayah relatif luas dengan lahan pertanian cukup menjanjikan, semestinya penduduk (baca: petani) yang tinggal di perdesaan dapat hidup makmur dan sejahtera. Akan tetapi pada kenyataannya belum berkondisi demikian, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan khususnya para petani/buruh tani masih banyak yang miskin. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2010) mencatat, bahwa penduduk seluruhnya sebanyak 237.641.326 jiwa, dari jumlah penduduk

tersebut yang miskin mencapai 31.023.400 jiwa (13,33 persen), dan diantara penduduk yang miskin tersebut sebanyak 19.925.600 jiwa (16,50 persen) bermukim di perdesaan yang sebagian bermatapencaharian sebagai petani.

Kenyataan ini diperparah oleh “*gonjanganjing*” krisis ekonomi dan keuangan berkepanjangan, yang mengakibatkan petani di perdesaan semakin miskin dan bertambah berat dalam berupaya mencapai kesejahteraan keluarga. Kondisi yang ironis, suatu negara yang memiliki sumberdaya alam perdesaan dengan lahan pertanian sangat subur, tetapi warga masyarakat petaninya mengalami kemiskinan. Kemiskinan, adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang baik sebagai individu maupun kelompok untuk memenuhi hak dasar secara layak, dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kementerian Sosial, 2011: 13). Mengacu pengertian tersebut, kemiskinan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan, serta kekurangan perihal lain yang menyangkut kualitas hidup manusia. Selain itu, kemiskinan juga dapat dimaknai tiadanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang merupakan aspek penting bagi si miskin untuk keluar dan terentah dari jurang kemiskinan. Masalah kemiskinan menurut Murdiyanto (2010: 7-8) dapat dipahami dari tiga pengertian. Pertama, kemiskinan dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar, dalam arti kekurangan materi mencakup kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kedua, kemiskinan dipahami sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk pendidikan dan informasi. Ketiga, dipahami sebagai kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya lahan pertanian. Pada sisi lain banyak lahan pertanian di perdesaan yang terbengkelai, karena kurang bahkan tidak diminati oleh

generasi muda yang seharusnya mengembangkan teknologi pertanian. Sementara sebagian generasi tua hanya mengandalkan usaha bertani secara tradisional, yang dilakukan turun-temurun dengan peralatan seadanya. Kondisi sebagaimana dikemukakan, pada gilirannya mengakibatkan kehidupan warga masyarakat di pelosok perdesaan mengalami keterbelakangan baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan, khususnya mereka yang bermatapencaharian sebagai petani/buruh tani semakin mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang dialami petani di pelosok perdesaan merupakan permasalahan sosial dengan dimensi sangat kompleks, sehingga upaya penanggulangannya memerlukan strategi secara komprehensif. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi latar belakang penyebab kemiskinan yang dialami petani di perdesaan, sebagai pijakan untuk menetapkan strategi penanggulangan.

Kajian ini dilakukan dengan permasalahan bagaimana kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta penyebab kemiskinan masyarakat petani di perdesaan. Tujuan kajian ini adalah menelaah kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tani di perdesaan, serta penyebab terjadinya kemiskinan dalam rangka memberi strategi upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak berkompeten khususnya Kementerian Sosial dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, bertujuan untuk membangun hubungan baru melalui pengalaman orisinal agar dapat menjelaskan makna-makna yang ada di dalam jalinan pengalaman itu sendiri (Raingruber, 2008: 87). Variasi yang diteliti adalah fenomena nyata yang terjadi pada saat peneliti berada di lokasi kajian. Peneliti selanjutnya menyajikan hasil temuan di lapangan secara apa adanya, berkaitan dengan pengalaman kemiskinan para

petani/buruh tani dan pengalaman upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul (aparatur bappeda, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, serta dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi).

Daerah penelitian adalah Kabupaten Bantul dengan *setting* lokasi Kecamatan Dlingo dan Pajangan. Dipilihnya dua kecamatan sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan berikut. Berdasarkan *database* Bappeda Kabupaten Bantul 2013, di wilayah tersebut masih terdapat 15 desa tertinggal dan satu desa sangat tertinggal. Kecamatan Dlingo terdiri dari enam desa, empat diantaranya termasuk desa tertinggal, sedangkan Kecamatan Pajangan meliputi tiga desa, dua diantaranya merupakan desa tertinggal. Di samping pertimbangan tersebut, dari 9.264 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Bantul yang bermatapencaharian sebagai petani, 1.267 jiwa adalah warga Kecamatan Dlingo dan 1.031 jiwa warga Kecamatan Pajangan. Sumber data adalah informan yang ditentukan secara *purposive*, yakni para pemangku kepentingan dan perwakilan petani yang dipandang memahami dan mampu menjelaskan informasi berkaitan kondisi kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan petani di lokasi kajian.

Secara rinci informan meliputi: Pertama, aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang berkompeten menangani masalah kemiskinan terdiri dari aparat bappeda, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, serta dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi. Kedua, aparat Kecamatan/Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat. Ketiga, aparat desa/kepala bagian kesejahteraan rakyat. Keempat, ketua kelompok tani. Kelima, petani dan buruh tani. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik: Pertama, wawancara berpanduan untuk menggali informasi secara mendalam tentang kondisi kemiskinan petani/buruh tani, faktor penyebab, dan upaya penanggulangannya. Kedua, observasi langsung di lokasi kajian untuk menelusuri data dan informasi guna memperoleh gambaran

situasi dan kondisi aktual daerah yang menjadi lokasi penelitian, dan ketiga telaah dokumen, yakni mempelajari semua catatan atau dokumen yang relevan dan data lapangan yang mendukung tujuan penelitian. Data yang berhasil dihimpun dianalisa secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan: Kondisi Kemiskinan dan Upaya Penanggulangan

Gambaran Umum Kabupaten Bantul. Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, timur dengan Kabupaten Gunungkidul, barat dengan Kabupaten Kulonprogo, dan selatan berbatasan dengan garis pantai Samudera Hindia. Secara fisiografi wilayah kabupaten tersebut dapat dikategorikan menjadi empat kondisi daerah: Bagian timur, merupakan perbukitan berlereng terjal dengan dominasi kemiringan curam (>70 persen), berketinggian mencapai 400 meter dari permukaan laut. Daerah ini relatif kurang subur meliputi sebagian wilayah Kecamatan Piyungan, Pleret, Imogiri, Pundong, Kretek, dan seluruh wilayah Kecamatan Dlingo. Bagian selatan, merupakan dataran gesik dan gumpuk pasir bergelombang yang cukup subur meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Bagian tengah, merupakan dataran rendah sangat subur karena endapan material vulkanik Gunung Merapi, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Banguntapan, Sewon, Jetis, Bantul, Bambanglipuro, dan Kecamatan Pandak. Bagian barat, merupakan perbukitan rendah dan tandus dengan kemiringan landai sampai curam berketinggian \pm 150 meter dari permukaan laut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sedayu, Kasihan, dan Kecamatan Pajangan.

Wilayah kabupaten tersebut seluas 506,86 km² (15,91 persen) dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara administrasi dibagi menjadi 17 kecamatan, 75 desa, 933 dusun, dan 5.656 RT. Menurut catatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (2013), keberadaan wilayah tersebut digunakan

untuk lahan bukan pertanian seluas 21.074 ha (42,99 persen), lahan pertanian mencakup untuk persawahan 15.482 ha (30,49 persen), dan untuk perladangan dan pategalan 14.129 ha (26,52 persen).

Kabupaten Bantul pada tahun 2013 berpenduduk sebanyak 930.276 jiwa, yang terdiri dari 465.296 lelaki 469.669 perempuan, serta terkelompokan kedalam 276.804 kepala keluarga (BPS Kabupaten Bantul, 2013). Dilihat laju pertumbuhannya dari tahun 2012-2013 sebesar 1,27 persen, lebih tinggi jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011-2012 yang hanya sebesar 1,07 persen. Dengan demikian, selama tahun 2013 di Kabupaten ini terjadi pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dibanding tahun sebelumnya.

Mengenai kondisi kesejahteraan sosialnya, mengacu BPS Kabupaten Bantul (2014) penduduk di wilayah tersebut dapat digambarkan; dari total jumlah keluarga sebanyak 276.804 KK (930.276 jiwa), sebagian yakni sejumlah 39.424 KK (122.021 jiwa) termasuk dalam kondisi miskin. Penduduk sebanyak 122.021 jiwa yang berkondisi miskin tersebut ternyata 9.264 jiwa diantaranya bermatapencarian sebagai petani dan buruh tani. Kondisi tersebut senada penegasan oleh Tyas Eko Raharjo (2013: 140), dengan menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia sebagian besar terjadi pada masyarakat perdesaan, mereka hanya menggantungkan penghasilan pada kegiatan pertanian.

Penyebab Kemiskinan Petani di Perdesaan: Dalam pengumpulan data di lapangan, ditemukan banyak faktor yang menyebabkan para petani tradisional di perdesaan dalam kondisi miskin, salah satunya faktor keadaan alam. Penyebab ini senada hasil kajian evaluasi revitalisasi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani yang dilakukan Bappenas pada tahun 2010, dengan menyebutkan bahwa kemiskinan petani di Indonesia terjadi karena dua keadaan yaitu kemiskinan secara alami dan kemiskinan karena ulah manusia. Kemiskinan secara alami terjadi akibat keterbatasan sumberdaya alam seperti lahan pertanian gersang dan tandus, musim yang

tidak bersahabat, atau akibat terjadinya suatu bencana alam.

Permasalahan sosial kemiskinan yang dialami para petani/buruh tani di perdesaan lokasi kajian karena faktor alam berupa, kondisi lahan pertanian (sawah) yang kurang subur dan sistem pengairan yang masih bersifat tadah hujan. Selain itu, kemiskinan petani di daerah tersebut terjadi karena faktor anomali cuaca yang seringkali mengakibatkan kegagalan panen. Sebagaimana dialami oleh ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat Sujarwo dengan menyatakan, bahwa kekeringan dan kegagalan panen palawija dan panen padi di daerah ini sering disebabkan faktor anomali iklim, yang akibatnya dirasakan cukup berat oleh para petani. Petani sebenarnya sudah melakukan perhitungan secara matang, tetapi faktor alam tersebut seringkali sulit diprediksi. Menurut penuturan informan ini, akibat faktor anomali cuaca tersebut potensi lahan pertanian di desa lokasi kajian seluas 59 hektar, tahun 2014 ini hanya dapat ditanami padi seluas 27 hektar. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan produksi padi secara signifikan. Dengan keadaan alam (lahan tandus) ditambah seringnya terjadi anomali cuaca, para petani/buruh tani di perdesaan ini sering mengalami musim paceklik akibat gagal panen. Kondisi ketidakpastian panen inilah yang membuat para petani/buruh tani di perdesaan ini senantiasa berada dalam jurang dan lingkaran kemiskinan.

Merujuk Edi Suharto (2009: 67), salah satu penyebab kemiskinan adalah faktor individual berkaitan dengan aspek patologis termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin seperti perilaku, pilihan, dan kemampuan. Apabila mengacu pendapat tersebut maka faktor individual penyebab kemiskinan petani di perdesaan lokasi kajian berupa rendahnya kemampuan atau kualitas sumberdaya manusia. Hasil penggalan data melalui wawancara didukung studi dokumentasi menunjukkan, bahwa para petani dan buruh tani tradisional yang menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Makmur yang terdiri 70 orang, ternyata sebagian besar yakni 56 orang (80 persen) berpendidikan SD dan SLTP,

dan hanya 14 orang (20 persen) yang berpendidikan SLTA. Menurut pengakuan informan, mereka belum menguasai teknologi pertanian, bahkan tingkat pendidikan para petani/buruh tani ini berbanding sejajar dengan teknologi lokal yang mereka hasilkan, baik teknologi di bidang bercocok tanam, bidang pengelolaan dan pengawetan hasil pertanian, maupun teknologi pemasaran produksi pertanian, yang sebenarnya hal tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Rendahnya kualitas sumberdaya petani yang dapat dilihat dari minimalnya tingkat pendidikan dan tingkat penguasaan teknologi, mengakibatkan mereka hanya mampu bercocok tanam dengan cara tradisional yang menurut Badudu (1994: 531) adalah mengolah lahan pertanian dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang, sehingga cenderung mengalami kesulitan untuk terentah dari kondisi miskin. Petani ataupun buruh tani ini bekerja dengan bersusah payah di sawah atau ladang sebenarnya mempunyai keinginan dan harapan untuk meningkatkan ekonomi keluarga guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, diantara mereka masih belum mampu mencapai kesejahteraan. Sebagian petani/buruh tani di daerah ini bahkan mengalami keterpurukan karena minimnya pengetahuan mengelola bidang pertanian dan kurangnya keterampilan bercocok tanam.

Faktor kultural yang menurut Edi Suharto (2009: 67) merujuk pada konsep budaya kemiskinan yang menyangkut mentalitas atau kebiasaan hidup seperti malas, menyerah pada nasib (fatalisme), tidak memiliki etos kerja, dan tidak berjiwa wirausaha, juga merupakan pendorong terjadinya kemiskinan petani dan buruh tani di daerah ini. Kebiasaan kurang baik berupa perilaku malas berusaha, sebagian berperilaku boros, dan ada pula yang bersikap pasrah, yang telah menjadi pola hidup para petani/buruh tani di perdesaan lokasi kajian, juga merupakan salah satu penyebab mereka kesulitan untuk keluar dari kondisi miskin. Dalam wawancara diperoleh informasi, bahwa di

antara mereka yang malas berusaha ini mengaku tidak cukup memiliki keterampilan pendukung untuk melakukan usaha. Selain tidak mempunyai modal uang, mereka juga belum terbiasa bekerja menjalankan usaha berdagang misalnya, karena yang dilakukan semenjak masih kanak-kanak adalah bekerja di kebun atau di sawah. Petani yang memiliki kebiasaan hidup boros mengaku bahwa perilaku hidup boros ini mereka lakukan semata-mata karena tuntutan anak, yang dari waktu ke waktu selalu minta kesenangannya untuk dicukupi. Sementara mereka yang berpola hidup pasrah mengaku bahwa sikap hidup tersebut mereka lakukan bukan tanpa alasan. Para petani/buruh tani kelompok ini mengemukakan, bahwa bersikap hidup pasrah ini mereka lakukan dengan berdasarkan filosofi yang diwariskan para leluhurnya, yakni sikap hidup "*nrimo ing pandum*" (menerima apa dan seberapa rejeki yang diberikan oleh Tuhan). Akan tetapi setelah peneliti cermati melalui konfirmasi dengan informan lain, ternyata mereka ini memaknai filosofi tersebut secara salah pengertian. Makna sejatinya adalah, bahwa manusia sebaiknya ikhlas menerima sebarang rejeki yang dikasikan Tuhan, setelah yang bersangkutan berdoa dan berupaya secara maksimal.

Pemasaran hasil pertanian. Karena keseharian petani dan buruh tani pada umumnya bertempat tinggal di daerah pelosok pedesaan dan relatif jauh dari perkotaan dengan keterbatasan prasarana dan sarana transportasi, mereka biasanya mengalami kesulitan mobilitas dalam memasarkan hasil pertanian. Kondisi ini berakibat para petani terpaksa menjual berbagai hasil pertanian kepada para tengkulak yang tidak memiliki posisi tawar, sehingga menjual hasil panen dengan harga relatif murah dan jauh dari kelayakan harga pasar.

Faktor struktural yang menurut Edi Suharto (2009: 68) berupa penyebab kemiskinan yang merujuk pada sistem tidak adil, tidak sensitif, dan tidak asesibel, juga memicu terjadinya kemiskinan petani dan buruh tani di daerah ini. Dalam hal ini menyangkut program pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada petani.

Sebagai contoh konkrit adalah sistem ekonomi liberalisme yang diterapkan pemerintah selama ini telah mengakibatkan para petani/buruh tani di perdesaan selalu terjerat sistem perekonomian, dan mengalami kesulitan untuk keluar dari jurang dan lingkaran kemiskinan. Menurut penuturan informan, kenaikan harga pupuk organik dirasa cukup memberatkan mereka dalam upaya mengembangkan usaha bertani baik melalui tanaman *palawija* (ubi-ubian) maupun tanaman padi. Karena ketergantungan para petani pada pupuk organik, maka tingginya harga pupuk ini merupakan “momok” bagi mereka. Selain itu, kecenderungan kenaikan harga bahan bakar minyak memicu naiknya berbagai kebutuhan pokok keseharian, dan menambah beban hidup para petani/buruh tani, hal ini menjadikan mereka terus mengalami kesulitan untuk dapat terentaskan dari kondisi kemiskinan. Di samping itu, kemiskinan secara struktural tersebut juga terjadi pada masyarakat petani di pelosok perdesaan, karena selama ini peran pemerintah belum optimal dalam mengembangkan potensi agraris. Bahkan sebaliknya, sejumlah lahan pertanian yang subur di berbagai daerah semakin berkurang akibat jatuh dan dikuasai oleh pihak pengembang untuk “menghabisi” keberadaan para petani tradisional di perdesaan.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Petani di Perdesaan: Upaya penanggulangan kemiskinan petani/buruh tani memerlukan strategi. Strategi merupakan cara atau kiat yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok untuk mengubah suatu kondisi yang kurang menguntungkan ke arah keadaan lebih baik sesuai yang diinginkan. Menurut Louis Johnson (dalam Abas Basuni, dkk. 2011: 35), bahwa strategi merupakan suatu pendekatan dan cara yang dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok untuk melakukan perubahan suatu situasi, dan di dalam strategi berisi peran dan tugas yang harus dilaksanakan. Sementara Trapman dan Erlis (dalam Ellen Netting 2011: 47) menyatakan, bahwa strategi merupakan suatu usaha yang disetujui untuk mempengaruhi orang

atau sistem yang dikembangkan dengan suatu tujuan yang pelaku harapkan.

Berdasar kedua definisi di atas dapat ditegaskan, bahwa strategi merupakan cara yang dirumuskan dengan langkah tertentu untuk melakukan suatu perubahan perseorangan ataupun kelompok masyarakat sesuai dengan keinginan yang diharapkan pelaku untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, strategi mengandung inti suatu kiat yang disusun dengan metode dan teknik tertentu secara sistematis untuk menanggulangi suatu permasalahan sosial. Mengacu uraian tersebut yang disesuaikan dengan konteks kajian ini, strategi merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, teknik, dan langkah-langkah tertentu untuk menanggulangi permasalahan sosial kemiskinan petani di perdesaan, agar meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Petani yang telah berkondisi sejahtera tentu memiliki kemandirian yakni mampu berusaha sendiri, kreatif, bekerja keras, dan kompetitif dalam melakukan usaha tani (Abdul Farid, 2008: 218).

Mengacu faktor penyebab dan kondisi kemiskinan petani/buruh tani di Kabupaten Bantul terutama yang tinggal di pelosok perdesaan, maka permasalahan sosial tersebut perlu mendapat perhatian secara serius dengan strategi penanganan secara tepat dari berbagai pihak berkompeten. Data pengamatan menunjukkan, bahwa petani tradisional dan buruh tani terlebih yang menggantungkan sawah tadah hujan atau lahan pategalan cenderung mengalami berbagai tekanan ekonomi relatif lebih berat dibanding petani penggarap lahan sawah beririgasi. Sementara dalam wawancara diperoleh data, bahwa ternyata berbagai aspek lokal daerah kajian seperti sumberdaya alam, manusia, serta sumberdaya sosial, ekonomi, dan budaya juga cenderung mempengaruhi kondisi kemiskinan petani dan buruh tani di pelosok perdesaan setempat. Dengan demikian, kemiskinan petani di pelosok perdesaan merupakan permasalahan sosial yang memerlukan model penanganan secara tepat dari berbagai pihak berkompeten.

Hasil pengumpulan data melalui wawancara terhadap jajarannya pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul, meliputi aparat Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta aparat Dinas Sosial, diperoleh temuan tentang strategi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan SKPD tersebut. Beberapa permasalahan sosial kemiskinan dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap keberadaan petani/buruh tani miskin di daerah perdesaan ternyata mencakup banyak aspek. Berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, maka kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dan pembinaan para petani/buruh tani dilakukan secara berintegrasi diantara lembaga berkompeten dengan beberapa upaya.

Pertama, Pemerintah Daerah Bantul telah mendorong secara bertahap dirumuskannya format pembangunan di tingkat kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan perdesaan. Format pembangunan tersebut kedepan senantiasa diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan sosial petani miskin. Kedua, pemerintah daerah setempat juga telah berusaha mengoptimalkan upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan menyinergikan antarunit kerja khususnya di internal instansi dalam lingkungan dinas pertanian. Upaya koordinasi juga telah dilakukan secara lintas kedinasan diantaranya dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Koperasi, bahkan antarpelaksana pengembang kawasan perdesaan dan masyarakat petani/buruh tani. Upaya koordinasi tersebut sesuai pandangan Edi Suharto (2007: XI) yang menyatakan, bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial tetap melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat. Keterlibatan pemerintah penting, namun dalam praktik dan pelaksanaan operasionalnya pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara bersama-sama oleh beragam pihak (*stakeholders*). Ketiga, pemerintah daerah selama ini juga terus mendorong SKPD terkait dan pemerintah kecamatan/desa

agar senantiasa merumuskan kebijakan yang diarahkan pada pembangunan prasarana dan sarana pertanian kawasan perdesaan, serta penyuluhan dan bimbingan sosial masyarakat petani secara terpadu dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan usaha menjaga produk pertanian (hasil panen) agar kegiatan sosial perekonomian masyarakat petani di perdesaan tetap berlangsung dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan sejumlah upaya. Pertama, Dinas Pertanian secara intensif terus melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam bercocok tanam, serta pemberian prasarana dan sarana untuk bertani secara memadai. Sarana pendukung yang dibantukan juga telah disesuaikan dengan kondisi lahan (sawah pengairan atau pategalan), ramah lingkungan, dan mudah digunakan petani. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga telah berupaya meningkatkan komunikasi dan akses petani untuk mendapatkan layanan dari dinas pertanian seperti penyuluhan pertanian, bantuan pupuk dan benih, serta diklat di bidang pertanian. Ketiga, pemberian bimbingan keterampilan dalam mengelola dan menjaga kesinambungan alam utamanya pelestarian lahan pertanian dengan berbagai upaya secara konstruktif dan berkelanjutan, misalnya pelatihan budidaya hutan rakyat dan pembuatan pupuk non organik.

Permasalahan sosial yang dialami petani miskin juga berupa keterisolasian dan kepelosokan wilayah perdesaan serta minimalnya prasarana dan sarana transportasi. Keadaan seperti itu tentu menyulitkan mobilitas masyarakat petani, menjadi kendala penjualan hasil pertanian, ataupun masuknya bahan kebutuhan pokok keseharian penduduk, yang akhirnya mengakibatkan terhambatnya perkembangan sosial serta tumbuhnya perekonomian dan budaya setempat. Kondisi buruk tersebut telah diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan beberapa upaya yang dilakukan. Pertama, terus diupayakan pembangunan

prasarana dan sarana perekonomian seperti jalan beraspal, pengoperasian sarana transportasi, pasar desa, optimalisasi peran bank perkreditan dan koperasi unit desa (KUD) serta berbagai fasilitas pendukung lain. Kedua, pembangunan sejumlah pusat komunikasi dan informasi seperti optimalisasi fungsi kantor pos, jaringan telepon, jaringan internet, serta jaringan siaran televisi dan radio, juga fasilitas pendukung lain yang diperlukan masyarakat perdesaan khususnya petani.

Permasalahan sosial klasik yang dialami petani/buruh tani miskin juga berkaitan dengan keterbatasan permodalan. Modal terbatas tersebut mengakibatkan petani mengalami kesulitan untuk melakukan usaha lain di luar bidang pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat melakukan beberapa upaya penanggulangan. Pertama, pengadaan sekaligus pengembangan sejumlah lembaga keuangan mikro seperti bank perkreditan, koperasi unit desa (KUD), dan BMT yang terus didorong untuk senantiasa berpihak pada petani melalui pemberian pinjaman jangka panjang dengan bunga yang relatif rendah. Kedua, pengadaan dan bantuan peralatan pertanian yang dimanfaatkan petani secara kolektif seperti *handtractor*, tabung pompa penyemprotan hama tanaman, mesin pompa air, dan alat tepatguna perontok padi dengan pengelolaan secara bersama. Ketiga, pembentukan dan pengembangan usaha bersama yang diarahkan pada pembentukan kelompok usaha bersama (Kube) ataupun pendirian koperasi petani lokal berbadan hukum, yang diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan keseharian para petani. Keempat, dinas koperasi secara terus menerus telah berusaha membudayakan sikap hidup hemat dan suka menabung pada masyarakat petani sekaligus mengikis perilaku pemborosan.

Data di lapangan menunjukkan, adanya eksploitasi perekonomian berupa sistem “*ijon*” yang sering dilakukan oleh pemilik modal terhadap petani miskin. Dalam menanggulangi permasalahan sosial tersebut, beberapa upaya juga telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pertama, dengan pemberian bantuan

untuk meringankan beban pinjaman bagi sejumlah petani yang terjerat utang-piutang. Kedua, memberikan penyuluhan melalui temu warga tani, dalam rangka pembinaan sistem jual beli hasil pertanian yang berkeadilan sosial berlandaskan semangat pasal 33 UUD 1945. Ketiga, meningkatkan fungsi dan peran lembaga perekonomian lokal seperti bank perkreditan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), KUD Tani, koperasi warga setempat, dan pasar tradisional tempat jual beli hasil panen.

Berkait dengan minimalnya penghasilan petani tradisional dan buruh tani yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mencapai tingkat kesejahteraan, telah dilakukan beberapa upaya yang ditempuh sejumlah pihak berkompeten. Pertama, pihak dinas perindustrian dan perdagangan telah melakukan bimbingan keterampilan home industri sebagai alternatif petani/buruh tani memperoleh penghasilan tambahan. Kedua, dinas pertanian telah mengembangkan budidaya tanaman pangan seperti sayur mayur, ubi-ubian, dan buah-buahan yang laku jual untuk menambah penghasilan petani. Di samping itu, dinas perindustrian telah menyelenggarakan pelatihan penganekaragaman produk makanan berbasis bahan pokok hasil pertanian seperti pengawetan bahan makanan dan pembuatan makanan camilan. Ketiga, Dinas Tenaga Kerja telah berupaya mengusahakan/menyediakan lapangan pekerjaan secara memadai, misalnya selalu mendorong berdirinya perusahaan pengolah hasil pertanian lokal seperti pabrik pengolahan singkong, pembuatan emping mlinjo ataupun emping garut yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, juga pengadaan sarana transportasi secara memadai bagi mereka yang mampu dan mau bekerja di Kota Yogyakarta ataupun luar daerah.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan petani di daerah tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga telah berperan yang pada tahun 2013 dilaksanakan dengan tiga program pokok berikut. Pertama, dilakukan melalui program Kube yang menurut data telah dibentuk 19 Kube di Kecamatan Dlingo dan 21 Kube

di Kecamatan Pajangan. Kegiatan usaha telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani miskin, karena jenis usaha yang dikembangkan kelompok seiring dan mendukung bidang pertanian seperti ternak kambing, penggemukan sapi, ternak ayam, persewaan *hand tractor*, persewaan pompa air, persewaan penggilingan padi, pembuatan tahu, pembuatan emping mlinjo, dan penjualan pupuk dan obat hama tanaman. Kedua, dilakukan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), yang semula diusulkan 10 kelompok dan ternyata terealisasi dua kelompok untuk Kecamatan Dlingo dan dua kelompok untuk Pajangan. Setiap kelompok terdiri dari tujuh sampai sepuluh keluarga, dengan bantuan dana Rp. 10.000.000,- untuk masing-masing rumah. Ketiga, dilakukan melalui peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada tahun 2013 telah mencapai 3.158 peserta, 96 peserta adalah warga Kecamatan Dlingo dan 153 peserta berasal dari Pajangan.

Beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang dialami petani tradisional sebagaimana dikemukakan telah dilaksanakan pihak berkompeten di Kabupaten Bantul. Strategi penanggulangan kemiskinan yang ditempuh kiranya telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah. Pada pasal 6 disebutkan, upaya penanganan kemiskinan di wilayah perdesaan dilakukan melalui: Pertama, penyediaan sumber matapencarian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan. Kedua, bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan. Ketiga, peningkatan pembangunan prasarana dan sarana. Keempat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa. Kelima, pemeliharaan dan pendayagunaan sumberdaya manusia, alam, dan sosial.

Hal urgen yang telah dilakukan pemerintah daerah setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan, adalah adanya keterpaduan dalam beberapa aspek. Pertama, keterpaduan kebijakan dan tanggung jawab diantara

lembaga berkompeten seperti Bappeda, dinas pertanian, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinas tenaga kerja, dinas sosial dan dinas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dialami petani tradisional di perdesaan dalam wilayah Kabupaten Bantul setidaknya telah diputuskan secara bersama oleh sejumlah lembaga tersebut di bawah koordinasi Bappeda. Kedua, keterpaduan iptek dalam arti bahwa upaya penanggulangan kemiskinan petani tradisional dan buruh tani telah didahului kajian berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang tugas pokok dan fungsi setiap lembaga berkompeten, sehingga program yang dilaksanakan di wilayah perdesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Ketiga, keterpaduan pelaksanaan program diantara lembaga berkompeten baik dalam pendataan, identifikasi permasalahan sosial, maupun dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan petani di perdesaan. Berdasar keterpaduan beberapa aspek tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan petani yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui SKPD terkait meskipun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, akan tetapi karena dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan serentak maka tetap bersifat komprehensif, sehingga strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin khususnya para petani/buruh tani di perdesaan.

D. Penutup

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa pada umumnya kondisi kemiskinan yang dialami petani di pelosok perdesaan Kabupaten Bantul berupa belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan. Selain itu, sebagian juga belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan informasi, komunikasi, dan teknologi. Pada sisi lain, kemiskinan petani muncul dalam bentuk

tiadanya kesempatan kerja ataupun kesempatan usaha, keterbatasan permodalan, dan masih cenderung bersikap *nrimo ing pandum* (berserah pada nasib), serta sebagian kurang memiliki etos kerja. Kebijakan pihak berkompeten dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebenarnya telah berpihak pada masyarakat miskin khususnya petani di perdesaan wilayah setempat.

Berdasar kesimpulan tersebut direkomendasikan, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan khususnya yang dialami petani di perdesaan perlu dilakukan dengan melibatkan banyak pihak berkompeten terutama SKPD terkait di tingkat kabupaten. Perlu adanya keterpaduan program diantara SKPD terkait di bawah koordinasi Bapeda, agar upaya penanggulangan kemiskinan petani yang dilakukan tidak mengalami tumpang tindih. Di samping itu, juga perlu menggerakkan partisipasi masyarakat seperti dunia usaha, organisasi petani (Gapoktan), dan berbagai organisasi sosial lain yang peduli permasalahan kemiskinan termasuk yang dialami petani.

Program penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu dirumuskan dengan suatu strategi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dalam hal ini “petani gurem”. Strategi yang perlu dikembangkan adalah pemberdayaan melalui mekanisme *bottom up* dengan menempatkan warga miskin sebagai subjek agar mampu menggal dan mendayagunakan potensi dan sumber lokal untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pemerintah diharapkan berperan sebagai motivator dan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani miskin di perdesaan.

Pustaka Acuan

- Abas Basuni, dkk. (2011). *Praktik Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS
- Abdul Farid. (2008). *Kemandirian Petani dalam Pengambilan Keputusan: Kasus Petani Sayuran di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Pasuruhan*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Nasional (Bappenas. 2010). *Kajian Revitalisasi Pertanian dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Jakarta: Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kabupaten Bantul dalam Angka*
- _____. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul (Welfare Indicators Bantul Regency)*
- Badudu. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Edi Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
- Ellen Netting. (2011). *Praktik Makro Pekerjaan Sosial*. Alih Bahasa Nelson Aritonang, dkk. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
- Kementerian Sosial. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) 2011*
- Murdiyanto. (2010). *Pengentasan Keluarga Miskin Melalui Kube (Pengkajian Kube Mandiri 06 di Karang Jati, Balikpapan)*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
- Raingruber. (2008). *Video-Cued Narrative Reflection: A Research Approach for Articulating tacit, Relational and Embodied Understandings-Qualitative Health Research*. 13 (8): 1155-1169
- Tyas Eko Raharjo, F. (2013). *Strategi Keluarga Miskin dalam Mengatasi Kemiskinan*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 12 No. 2 Juni 2012